

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahun 2022, tepatnya pada tanggal 24 Februari 2022 menjadi salah satu tanggal yang sangat penting bagi sejarah dunia. Pasalnya pada tanggal tersebut menjadi tanggal ketika Vladimir Putin selaku presiden Rusia menyatakan operasi militernya kepada negara Ukraina. Operasi militer tersebut dilayangkan ke banyak kota di Ukraina, seperti Kyiv, Odessa, Kharkiv, dan masih banyak lagi. Peristiwa operasi militer ini sendiri dipicu karena kemarahan Rusia terhadap Ukraina yang ingin bergabung bersama NATO (Barak, 2022). Atas peristiwa operasi militer tersebut, Rusia kemudian mendapatkan banyak sanksi dari beberapa negara, khususnya oleh Uni Eropa. Sanksi-sanksi tersebut berkaitan dengan sektor keuangan, sektor minyak, pembekuan aset, serta pada sektor ekspor-impor komponen elektronik (SindoNews, 2023a).

Namun terdapat hal menarik pasca terjadinya peristiwa tersebut, yaitu respons yang diberikan oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Dalam merespon operasi militer Rusia, mayoritas masyarakat Indonesia justru memberikan respons positif dan terkesan memberikan dukungan terhadap apa yang dilakukan Rusia. Bahkan ungkapan “*Uraa*” yang berasal dari Rusia sempat menjadi kata yang populer di masyarakat Indonesia beberapa minggu setelah peristiwa operasi militer tersebut (Vice, 2022).

Memang jika dilihat respons masyarakat Indonesia dalam menanggapi isu

operasi militer Rusi-Ukraina ini patut dipertanyakan, pasalnya Indonesia menjadi salah satu negara yang menyetujui resolusi PBB terhadap Rusia (CNN Indonesia, 2022). Tentunya menjadi pertanyaan mengapa respons yang diberikan mayoritas masyarakat Indonesia berbanding terbalik dengan respons yang diberikan pemerintah Indonesia, yaitu adanya perpecahan masyarakat Indonesia dalam merespon isu operasi militer ini dengan mayoritas masyarakat memberikan respons positif terhadap Rusia. Selain itu, adanya beberapa sentimen yang disinggung pada respons masyarakat Indonesia terhadap Rusia, diantaranya yang paling banyak ditulis adalah sentimen anti-Barat, pro-muslim, serta kepemimpinan tegas/otoriter.

Menurut laporan yang dipublikasikan oleh Evello, sebuah platform untuk pemantauan dan analisis digital, terdapat peningkatan perhatian pengguna media sosial di Indonesia terhadap konflik Rusia-Ukraina di platform seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan Youtube mulai dari tanggal 23 Februari hingga 14 Maret 2022 (BBC Indonesia, 2022). Dudy Rusdianto, pendiri dari Evello, mengungkapkan bahwa warganet menunjukkan tiga sikap berbeda terhadap operasi militer Rusia ke Ukraina. Sikap pertama adalah ketidaksukaan terhadap Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dan Amerika Serikat, sikap kedua adalah kekaguman terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin, dan sikap ketiga adalah simpati terhadap rakyat Ukraina dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

Dukungan masyarakat Indonesia terhadap Rusia juga tercermin dalam tanggapan terhadap KTT G20 yang diadakan pada tahun yang sama. Sebelum

acara tersebut dilaksanakan, mayoritas masyarakat Indonesia pada waktu itu menyetujui kehadiran Rusia dalam pertemuan ekonomi internasional tersebut. Hal ini terungkap dari hasil survei yang dilakukan oleh lembaga Indikator Politik Indonesia pada tanggal 18-24 Mei 2022. Menurut survei ini, sebanyak 71,6 persen responden (gabungan persentase yang sangat setuju dan setuju) mendukung keputusan pemerintah Indonesia untuk mengundang Rusia dan Ukraina. Lebih jauh, survei menunjukkan bahwa jika hanya Rusia yang diundang, persentasenya mencapai 76,6 persen (KumparanNews, 2022). Dengan melibatkan 1.213 responden, survei ini menegaskan bahwa masyarakat mendukung kehadiran Rusia dalam KTT G20. Hasil ini menunjukkan bahwa masyarakat tetap memberikan dukungan dan respon positif terhadap Rusia meskipun telah melakukan operasi militer ke Ukraina.

Tentunya respons masyarakat Indonesia yang tidak biasa ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana bisa masyarakat Indonesia memberikan respons tak terduga dan berbeda pada peristiwa operasi militer Rusia ke Ukraina tersebut. Operasi militer yang notabennya identik dengan kekerasan dan peperangan justru respons yang diberikan cenderung positif oleh masyarakat Indonesia. Penelitian ini menggunakan perspektif dari post-strukturalisme dan post-kolonialisme untuk membantu mencari tau faktor-faktor lain yang mempengaruhi respons suatu masyarakat, dalam hal ini yaitu masyarakat Indonesia pada peristiwa Operasi militer Rusia ke Ukraina.

Apalagi mengingat bahwa dari adanya respon masyarakat Indonesia terhadap operasi militer Rusia ke Ukraina ini menurut penelitian Januari (2023),

telah menyebabkan terbentuknya polarisasi diantara masyarakat Indonesia. Terbelahnya opini public menjadi suatu fenomena polarisasi yang membuat masyarakat Indonesia pada akhirnya pro Rusia dan pro Ukraina (Adham, 2023). Bahkan menurut penelitian dari Setiawan (2019) menjelaskan bahwa opini publik terhadap suatu isu bisa membawa dampak terhadap proses pengambilan kebijakan pemerintah Indonesia khususnya terhadap isu krisis dan perang (Setiawan, 2019). Hal ini juga dibuktikan dengan pengambilan sikap dari Indonesia atas serangan yang dilakukan Rusia ke Ukraina dimana Indonesia bahkan mendesak Dewan Keamanan PBB agar bisa mengambil langkah agar bisa mencegah supaya situasi tidak semakin memburuk. Pemerintah Indonesia juga melalui Kementerian Luar Negeri telah menjalankan rencana untuk evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) baik di Ukraina maupun Rusia (Kemlnlu, 2022). Sikap ini diambil Indonesia karena melihat semakin memanasnya konflik antara keduanya yang kemudian membawa dampak bagi aspek ekonomi Indonesia dan opini publik yang semakin besar di media sosial. Atas dampak ini pula maka penting untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai alasan atas respons dari masyarakat Indonesia. Apalagi mengingat bahwa belum adanya penelitian yang membahas dari aspek tersebut.

Teori post-strukturalisme pada penelitian ini dipilih untuk mencari tahu apakah terdapat faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi terbentuknya suatu realitas. Faktor-faktor yang dimaksud meliputi seperti faktor sejarah, politik, sosial, atau budaya. Faktor-faktor tersebut kemudian membentuk sebuah realitas yang didalamnya terdapat representasi ataupun intepretasi tertentu. Selain itu, post-kolonialisme dipilih untuk melihat apakah ada keterkaitan sejarah di masa

lalu terkait penjajahan yang pernah dirasakan Indonesia dengan respons yang diberikan masyarakat Indonesia terkait isu operasi militer saat ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, rumusan masalah yang dapat ditarik adalah : Mengapa mayoritas masyarakat Indonesia memberikan respons positif terhadap Rusia pada peristiwa operasi militer Rusia-Ukraina?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi respons masyarakat Indonesia terhadap peristiwa operasi militer Rusia-Ukraina.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana faktor-faktor yang telah diuraikan memengaruhi respons masyarakat Indonesia terhadap peristiwa operasi militer Rusia-Ukraina.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi

perkembangan pengetahuan serta memperkaya wawasan dalam kajian post-strukturalisme serta pos-kolonialisme pada studi Hubungan Internasional.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif bagaimana representasi-representasi pada respons masyarakat Indonesia terkait operasi militer Rusia-Ukraina dapat terbentuk melalui faktor-faktor seperti sejarah, sosial, politik, dan budaya.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Post-Strukturalisme

Paradigma konvensional Hubungan Internasional (HI) telah mengatur dinamika politik global hingga dekade 1980-an. Sebagai respons kritis terhadap teori-teori yang ada, muncul Pos-strukturalisme melalui upaya para cendekiawan seperti Foucault, Der Derian, Shapiro, dan Walker. Pendekatan ini mengguncang dunia HI dengan menyoroti isu-isu filosofis seputar interpretasi, kekuasaan, pengetahuan, silsilah, dan dekonstruksi. Pos-strukturalisme bertujuan untuk membuat masyarakat, terutama dalam konteks politik global, menyadari aspek-aspek yang sebelumnya diabaikan atau dikecualikan oleh teori-teori sebelumnya.

Post-strukturalisme merupakan sebuah teori dalam studi HI yang menempatkan dirinya sebagai paradoks terhadap teori-teori hubungan internasional mainstream, terutama terhadap teori-teori klasik atau tradisional. Hal tersebut didasari oleh pandangan post-strukturalisme yang menyatakan bahwa

kebenaran atau fakta dalam fenomena hubungan internasional tidak dapat dilepaskan dari subjektivitas manusia serta menolak adanya objektivitas universal (Foucault, 2005). Bahkan jika dilihat dari epistemologinya, post-strukturalisme Foucault mengajarkan kita bahwa apa yang kita sampaikan, apa yang kita ketahui, tindakan kita, dan identitas kita sebenarnya dipengaruhi oleh wacana. Wacana inilah yang membentuk cara berpikir, mengetahui, dan bertindak berdasarkan pengetahuan yang kita miliki (Hidayah et al., 2023).

Gagasan mengenai kekuasaan tradisional, konsep subjektivitas, dan identitas disatukan dalam suatu wacana, seperti yang diungkapkan oleh Foucault. Wacana ini terkait dengan serangkaian representasi dan praktik tertentu yang digunakan untuk mengonstruksi makna, menciptakan identitas, dan mengorganisir hubungan sosial (Foucault, 2013). Secara lebih luas, kata-kata memiliki dimensi sosial karena seseorang tidak dapat membuat perasaan atau pemikiran mereka dapat dimengerti oleh orang lain tanpa adanya resonansi budaya tertentu atau kesamaan nilai. Definisi ini mencakup makna global dari wacana, yang dijelaskan oleh Foucault sebagai mekanisme linguistik yang menggerakkan 'pernyataan dan konsep'. Di sisi lain, dalam konteks politik, peran bahasa menjadi semakin penting karena politisi dan pelaku politik global harus melegitimasi tindakan luar negeri mereka baik di hadapan publik dalam negeri maupun di mata dunia internasional.

Post-strukturalisme muncul sebagai respons terhadap kegagalan strukturalisme Prancis dalam memahami eksistensi subjek dan kesalahan dalam mengartikan hubungan antara bahasa dan kekuasaan. Berbeda dengan pandangan strukturalisme yang meyakini adanya makna yang tetap atau mutlak serta struktur

yang mengikat bahasa, teori post-strukturalisme justru menolak pengaruh struktur dan meyakini bahwa makna bersifat relatif dan struktur tidak stabil (Suyanto et al., 2023). Post-strukturalisme menyoroti pentingnya mempertanyakan narasi dan representasi, serta memperhatikan kekuasaan dan hierarki yang tersembunyi di dalamnya. Pendekatan ini menekankan bahwa realitas politik tidaklah objektif atau tetap, melainkan terbentuk melalui interpretasi, representasi, dan konstruksi sosial (Hidayah et al., 2023).

Terdapat empat asumsi dasar pada pos-strukturalisme. Pertama, pendekatan ini kritis terhadap teori-teori yang telah ada dan senantiasa mempertanyakan segala hal. Kedua, kritik dianggap sebagai upaya positif untuk mengejar alternatif, meskipun juga tidak menolak sepenuhnya teori yang telah ada sebelumnya. Ketiga, dalam politik internasional, interpretasi dan representasi merupakan hal penting dan tak terhindarkan, yang mana sejalan dengan keyakinan konstruktivisme bahwa fakta sosial merupakan hasil dari interpretasi manusia. Keempat, post-strukturalisme menolak pemisahan subjek dan objek dalam ilmu pengetahuan, hal tersebut berbeda dengan post-positivisme yang meyakini bahwa keduanya tidak dapat dipisahkan (Hiddleston, 2010).

Menurut Campbell, salah satu tokoh post-strukturalisme, pendekatan ini mengkritik pandangan strukturalis tradisional yang menyatakan bahwa negara merupakan entitas yang stabil dan rasional. Campbell dan para sarjana lainnya yang tertarik pada pendekatan ini berpendapat bahwa apa yang terjadi dalam politik dunia lebih baik dijelaskan sebagai pertunjukan daripada peristiwa-peristiwa yang terjadi secara alami. Mereka berpendapat bahwa politik dunia

merupakan panggung negara-negara "bertindak" dan "berinteraksi" di hadapan dunia. Mereka menekankan pentingnya memahami bagaimana makna kolektif dibentuk dan disebarakan melalui pertunjukan sosial (Ringmar, 2014).

Pos-strukturalisme meyakini bahwa pengetahuan atau ilmu sangat terkait dengan kekuatan atau kekuasaan. Namun, kekuasaan yang dimaksud bukan hanya tindakan represif atau agresif, melainkan juga kekuasaan yang produktif melalui pembatasan dan kendala (Campbell, 1992). Mereka berpendapat bahwa tidak ada kebenaran yang mutlak karena kebenaran harus terus dijelajahi. Identitas dianggap sangat penting oleh kaum pos-strukturalis, dan identitas aktor dalam Hubungan Internasional akan memengaruhi perilaku mereka dalam dinamika dunia internasional. Seperti halnya pengetahuan, identitas bagi mereka juga terkait erat dengan kekuasaan. Pengetahuan yang dimiliki aktor menciptakan identitas, yang kemudian memengaruhi cara mereka berpikir dan bertindak dalam Hubungan Internasional (Hiddleston, 2010).

Foucault menyoroti peran penting dari kekuasaan dalam pembentukan identitas, yang mencakup penentuan norma dan nilai-nilai sosial yang membentuk individu atau kelompok. Kekuasaan juga memengaruhi cara individu atau kelompok memandang diri mereka sendiri, orang lain, serta realitas sekitar. Dia mengajukan bahwa realitas sosial terkonstruksi melalui bahasa, dengan menekankan bagaimana diskursus bahasa menjadi dominan dan mengendalikan makna serta kebenaran. Selain itu, Foucault juga menyatakan bahwa kekuasaan bersifat produktif dan tersebar di seluruh hubungan sosial, hal tersebut kemudian menciptakan beragam bentuk perilaku. Keterkaitan antara kekuasaan dan

pengetahuan ini menghasilkan diskursus dominan yang dianggap sebagai kebenaran oleh penguasa dan diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, identitas dipengaruhi oleh kekuasaan dan diskursus bahasa yang dominan (Rosyidin, 2023).

Selain Foucault, menurut Roxanne Lynn Doty, identitas merupakan salah satu aspek penting yang ditekankan dalam post-strukturalisme. Identitas dapat dikonstruksi sehingga menimbulkan realitas baru tertentu. Konstruksi identitas dalam hubungan internasional menurut Doty adalah proses pembentukan dan penggunaan identitas dalam konteks hubungan internasional. Identitas dapat dibangun dan digunakan untuk membenarkan atau menentang kebijakan dan tindakan keamanan yang diambil oleh negara-negara. Identitas juga dapat digunakan untuk memperkuat hubungan antara negara-negara atau sebaliknya, serta dapat digunakan untuk memperkuat perbedaan dan ketidaksetaraan antara negara-negara tersebut (Doty, 1996).

Doty menyoroti pentingnya mempertimbangkan bagaimana identitas dibangun dan digunakan dalam hubungan internasional. Ia menunjukkan bahwa identitas dapat digunakan untuk membenarkan kebijakan dan tindakan keamanan yang merugikan negara-negara selatan. Identitas juga dapat digunakan untuk memperkuat hubungan antara negara-negara utara dan selatan, atau sebaliknya, serta untuk memperkuat perbedaan dan ketidaksetaraan antara negara-negara tersebut. Sebagai contoh, identitas "Utara" seringkali digunakan untuk membenarkan kebijakan dan tindakan keamanan yang merugikan negara-negara selatan, dengan menggambarkan negara-negara selatan sebagai daerah yang

terbelakang dan tidak mampu mengelola keamanan mereka sendiri. Identitas "Utara" juga seringkali digunakan untuk memperkuat perbedaan dan ketidaksetaraan antara negara-negara utara dan selatan (Doty, 1996).

1.5.2 Post-kolonialisme

Post-kolonial atau pasca-kolonial memiliki keterkaitan yang erat dengan fenomena penjajahan. Menurut Loomba (2002), asal-usul kata kolonial berasal dari bahasa Latin "colonia," yang merujuk kepada tanah pertanian atau pemukiman. Oleh karena itu, istilah "kolonialisme" dapat diartikan sebagai pendudukan warga di suatu wilayah di luar tanah asal mereka, namun daerah tersebut tetap dianggap sebagai wilayah mereka. Dalam pelaksanaan kolonialisme oleh pihak pendatang, yang tujuan utamanya adalah mengeksploitasi sumber daya alam, seringkali berujung pada konflik bersenjata dengan penduduk asli. Dalam kerangka sistem kolonialisme, kesejahteraan penduduk di wilayah jajahan tidak menjadi prioritas utama, sehingga seringkali menimbulkan trauma dalam sejarah manusia, terutama antara penduduk asli dan pihak pendatang.

Kemerdekaan suatu negara tidak selalu membawa perubahan yang positif dalam hal perempuan, kelas pekerja, dan petani di bekas negara jajahan. Definisi tersebut menunjukkan adanya pernyataan dasar terkait konsep poskolonialisme, yang meyakini bahwa dampak-dampak kolonial masih terasa oleh masyarakat di negara bekas jajahan, meskipun mereka telah merdeka. Teori poskolonialisme juga diterapkan dalam kajian sastra, sebagaimana diungkapkan oleh Foulcher dan Day (2002), yang menyatakan bahwa pendekatan poskolonial terhadap sastra membahas

cara di mana teks sastra mencerminkan jejak-jejak kolonial, termasuk pertentangan antar bangsa dan budaya dalam konteks hubungan yang tidak setara, yang telah terjadi sejak zaman imperialisme Eropa.

Pada teori poskolonial mencakup tiga aspek utama, yakni: (a) kebudayaan masyarakat yang pernah mengalami penjajahan Eropa; (b) respons perlawanan atau wacana tandingan dari masyarakat terjajah dan masyarakat lain terhadap penjajahan; (c) segala bentuk marginalitas yang timbul akibat berbagai bentuk kapitalisme (Yuniani, 2022).

Poskolonialisme memiliki ciri khas dengan fokusnya pada berbagai pembahasan terkait kolonialisme, terutama orientalisme. Menurut Edward Said, orientalisme adalah suatu pendekatan Barat yang bertujuan untuk mendominasi, mengorganisir ulang, dan menguasai Timur. Menurut Edward Said, orientalisme merupakan suatu pandangan ataupun pendapat yang didasarkan epistemologis, dan otologis dari Timur dan Barat (Karolina, 2022). Orientalisme berasal dari suku kata "*orient*" yang artinya adalah Timur. Sedangkan orientalisme diambil dari Bahasa serapan Bahasa Inggris yakni "*orientalism*" yang diartikan sebagai paham/pemikiran/pandangan yang membahas kajian mengenai Timur (Yunika, Pujawati, & dkk, 2023). Oleh sebab itu, orientalisme secara sederhana bisa dipahami sebagai pemikiran yang dilakukan oleh ilmuan Barat yang mengkaji mengenai ketimuran baik mengenai agama, social, budaya, sejarah, dan lainnya dengan menggunakan pandangan dunia Barat namun Timur dijadikan sebagai objek penelitiannya (Haqan, 2011).

Menurut Bahar, pemikiran orientalisme berkaitan erat dengan islam karena

hubungan Timur dengan Islam tidak dapat dilepaskan. Maka dari itu menurut Bahar, munculnya pemikiran ini dilatarbelakangi oleh beberapa motif yang diantaranya yaitu pertama motif keagamaan. Pada motif ini dapat terlihat dari bagaimana Barat yang mewakili Kristen banyak menilai bahwa Islam merupakan suatu agama yang dari awal menentang doktrin kekristenan. Bagi pemikir Barat, kritik ini harus dijawab supaya tidak membawa pengaruh pada Kristen. Orientalis memoles bahwasanya metodologi pada agama mereka lebih baik. Kedua yaitu motif keilmuan. Pada motif ini Islam dianggap telah mencatat keberhasilan dalam pengembangan teknologi dan sains. Maka dari itu Barat melakukan penerjemahan pada karya-karya muslim. Ketiga adalah motif karena persoalan ekonomi. Munculnya perkembangan industrialisasi membuat Barat pada akhirnya membutuhkan daerah untuk pasar sekaligus jajahan. Oleh sebab itu Barat melakukan kajian pada kondisi demografi, agama, politik, dan kultur pada umat Islam. Lalu terakhir adalah motif keempat yaitu politik. Barat menilai bahwa Islam telah menguasai dan menyebarkan peradaban dunia dengan cepat. Oleh sebab itu Barat mempelajari pemikiran Islam (Bahar, 2016).

Ketertarikan para pemikir Barat mengenai Timur juga dijelaskan oleh Edward Said dalam bukunya yang berjudul *Orientalism* yang dimana dalam bukunya menjelaskan bagaimana ketertarikan pemikir Barat untuk mengkaji Timur didasarkan karena sikap ingin mendominasi, bukan karena simpatik. Lebih lanjut Edward Said mengungkapkan bahwa kajian para pemikir Barat terhadap Timur penuh dengan stereotip-stereotip rasial, imperialis, dan ideologis (Irfanullah, 2015).

Menurut pemikiran Edward Said, orientalisme ini menjadi suatu pemikiran dan ide yang telah terorganisir seperti pola yang ingin membuat generalisasi tentang dunia lain yang disebut sebagai “Timur”. Sederhananya, Said dalam pandangannya mengenai orientalisme meyakini bahwa terdapat dorongan intelektual dan otoritas epistemologis yang membuat Barat pada akhirnya menginjakkan kaki imperialisme mereka di kawasan Timur (Oueijan, 2010).

Melalui pemikiran ini, Edward Said kemudian membedakan orientalisme menjadi tiga tempat. Pertama yaitu orientalisme yang berkaitan dengan menciptakan sejarah pahit antara Timur dan Barat. Kemudian kedua yaitu orientalisme yang berkaitan dengan membangun ilmu pengetahuan agar bisa menjadi spesialis oriental. Terakhir, ketiga yaitu orientalisme yang berhubungan dengan geografis dimana pada akhirnya menciptakan ideologi Timur “*the Other*” dan Barat “*the Occident*” (Yunika, Pujawati, & dkk, 2023). Sehingga bisa dikatakan bahwa pemikiran Edward Said dalam bukunya *Orientalisme* ini mencoba untuk menggugat pandangan pemikir Barat mengenai Timur. Maka dari itu orientalisme tidak bisa dipisahkan dari kolonialisme Barat. Menurut Edward Said, kelompok oriental Barat dan Kolonialis sangat merendahkan Timur. Melalui pemikiran ini pula poskolonialisme berusaha untuk menuntut pemikiran kolonial Barat yang telah membuat munculnya ketidakseimbangan, rasisme, ataupun kekerasan (Anderson, 1999). Postkolonial ini pula menjadi bentuk kritik dominasi dan berusaha untuk menghilangkan discredit kolonialisme dengan cara menggerakkan pemikiran yang lebih netral dan objektif terhadap bangsa Timur.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konseptual

1.6.1.1 Representasi

Menurut Campbell, representasi merujuk pada cara di mana realitas politik direpresentasikan melalui bahasa, narasi, simbol, dan praktik-praktik sosial. Dia menunjukkan bahwa realitas politik tidak bersifat objektif atau dapat diukur secara obyektif, tetapi dibentuk oleh interpretasi dan representasi subjektif. Representasi ini terjadi dalam diskursus politik, di mana kekuasaan dan pengetahuan saling terkait. (Campbell, 1992). Sedangkan menurut Roxanne Lynn Doty, representasi dalam konteks hubungan internasional yaitu antara Utara-Selatan adalah proses pembentukan dan penggambaran suatu kelompok atau entitas oleh kelompok lain. Representasi ini dapat melibatkan stereotip, klise, atau narasi yang dibentuk oleh negara-negara Utara terhadap negara-negara Selatan.

Doty menyoroti bagaimana representasi yang salah atau tidak adil dapat memperkuat ketidaksetaraan dan dominasi yang ada dalam hubungan Utara-Selatan. Representasi yang dibentuk oleh negara-negara Utara sering kali mencerminkan pandangan yang merendahkan dan memperkuat superioritas mereka terhadap negara-negara Selatan. Representasi ini melibatkan cara-cara di mana negara-negara Utara (negara maju) menggambarkan dan memahami negara-negara Selatan (negara berkembang), ataupun sebaliknya. Selain itu Doty juga menyoroti bagaimana representasi yang salah atau tidak adil dapat memperkuat ketidaksetaraan dan dominasi yang ada dalam hubungan Utara-Selatan. Representasi yang dibentuk oleh negara-negara Utara sering kali mencerminkan

pandangan yang merendahkan dan memperkuat superioritas mereka terhadap negara-negara Selatan (Doty, 1996).

Dalam memandang suatu representasi, terdapat beberapa faktor penting yang mempengaruhi, yaitu:

1. Sejarah: Sejarah suatu negara atau aktor dapat mempengaruhi representasi dalam hubungan internasional. Pengalaman masa lalu, konflik, kolonialisme, dan perubahan politik dapat membentuk cara negara atau aktor tersebut direpresentasikan dalam konteks hubungan internasional.
2. Sosial budaya dan Politik: Faktor sosial budaya dan politik, seperti bahasa, agama, adat istiadat, dan tradisi, juga dapat mempengaruhi representasi dalam hubungan internasional. Budaya dapat mempengaruhi cara negara atau aktor dipahami dan diwakili dalam konteks hubungan internasional.

1.6.1.2 Respons

Respons yang berasal dari hasil kata response, mengacu pada tanggapan, tindakan, atau jawaban terhadap suatu masalah yang diberikan kepada masyarakat. Menurut Effendy dalam bukunya yang berjudul Ilmu Komunikasi Teori dan Praktik, respon adalah tanggapan, serangkaian reaksi yang dilakukan oleh komunikan setelah menerima pesan. Manusia sering kali memberikan respon yang berbeda terhadap rangsangan yang sama, karena tidak ada dua manusia yang sama persis, baik dalam hal kemampuan sensorik maupun pengalaman sosial yang diperoleh dari lingkungan. Menurut Saifuddin Azwar dalam bukunya yang berjudul Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya, respons adalah reaksi atau jawaban yang dipicu oleh stimulus atau merupakan hasil dari stimulus itu sendiri.

Respons seseorang dapat bervariasi dalam bentuk positif atau negatif, menyenangkan atau tidak menyenangkan (Wijayanti, 2017).

1.6.1.3 Operasi militer

Operasi militer merupakan istilah politik yang menggambarkan upaya agresi yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain dengan menggunakan angkatan bersenjata atau militer untuk mengambil alih pemerintahan yang ada sebelumnya. Menurut Kamus Militer, operasi militer adalah tindakan militer yang melibatkan sebagian besar pasukan dari suatu entitas geopolitik untuk memasuki wilayah yang dikuasai oleh entitas lain. Tujuan dari operasi militer dapat beragam, mulai dari penaklukan, pembebasan, hingga pengambilan kembali kendali atau wewenang atas suatu wilayah secara paksa dengan cara membagi negara, mengubah pemerintahan, atau kombinasi keduanya. Operasi militer biasanya didorong oleh keinginan untuk menegakkan kedaulatan negara yang melakukannya, namun seringkali dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan negara yang diserang (Puspita, 2022).

1.6.2 Definisi Operasional

1.6.2.1 Representasi

Definisi operasional disini merupakan implementasi dari teori pada fenomena atau permasalahan yang dianalisis, dalam hal ini yaitu pada fenomena terjadinya respon positif masyarakat Indonesia pada peristiwa operasi militer Rusia ke Ukraina. Untuk itu, dalam definisi operasional ini mencoba menganalisis representasi apa saja dari masyarakat Indonesia kepada negara Rusia, serta faktor-

faktor yang mempengaruhi dan membentuk representasi tersebut sehingga memunculkan suatu realitas yaitu respons masyarakat Indonesia. Faktor-faktor tersebut yaitu dari faktor sejarah, sosial budaya dan sosial politik.

1.6.2.2 Respons

Pada penelitian ini, respons yang dimaksudkan adalah respons yang diberikan masyarakat Indonesia terhadap peristiwa operasi militer Rusia-Ukraina. Dalam penelitian ini mengamati bagaimana masyarakat Indonesia merespons peristiwa operasi militer tersebut, yang kemudian dianalisis bagaimana respons tersebut terbentuk menggunakan kerangka teori yang sudah ditentukan.

1.6.2.3 Operasi militer

Pada penelitian ini, operasi militer yang dimaksud adalah terkait peristiwa penyerangan operasi militer yang dilakukan negara Rusia kepada negara Ukraina pada bulan February 2022. Operasi militer tersebut mendapat banyak respons dari masyarakat internasional, salah satunya dari masyarakat Indonesia, yang kemudian respons tersebut dianalisis pada penelitian ini.

1.7 Argumen Penelitian

Penelitian ini mengajukan argumen penelitian bahwa adanya representasi positif dari masyarakat Indonesia kepada Rusia, diantaranya terkait sentimen anti-Barat, pro-islam, dan pemimpin tegas/kuat. Representasi tersebut dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat Indonesia terkait hubungan sejarah, sosial budaya dan politik dari kedua negara. Selain itu, representasi masyarakat Indonesia terhadap Rusia juga salah satu bentuk dari akibat pasca-

kolonialisme yang pernah dialami Indonesia di masa sebelumnya. Representasi positif Indonesia kepada Rusia tersebut yang kemudian mempengaruhi masyarakat Indonesia dalam memberikan respons pada peristiwa Operasi militer Rusia ke Ukraina sehingga terbentuklah realitas yaitu respons positif masyarakat Indonesia pada Rusia terkait peristiwa operasi militer ke Ukraina.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki fenomena alamiah, dimana peneliti berperan sebagai instrumen utama, pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi teknik, analisis data bersifat induktif, dan penekanan utama penelitian kualitatif adalah pada pemaknaan daripada generalisasi.

1.8.2 Subjek Penelitian

Subjek yang diteliti pada penelitian ini adalah respons masyarakat Indonesia terkait peristiwa operasi militer Rusia-Ukraina di media *Twitter* yang kemudian memunculkan representasi tertentu.

1.8.3 Jenis Data

Dalam rangka menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, pemilihan jenis data dan informasi yang tepat akan memainkan peran penting dalam membantu peneliti memperoleh jawaban yang sesuai dengan fokus penelitian. Biasanya, dalam konteks penelitian kualitatif, jenis data yang dikumpulkan meliputi teks serta analisis kata-kata yang terkait dengan kasus yang

diteliti. Oleh karena itu, peneliti menggunakan berbagai jenis data seperti persepsi, pengetahuan umum, fakta, dan juga teori.

1.8.4 Sumber Data

Menurut Purhantara (2010), terdapat dua jenis sumber data dalam penelitian, yakni data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan instrumen penelitian primer. Sementara itu, data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, melainkan dari berbagai sumber seperti laporan, arsip, jurnal, dan artikel publikasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari berbagai bentuk informasi yang tidak diperoleh langsung dari subjek penelitian, seperti jurnal artikel, buku, arsip pemerintahan, dan laporan analisis.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Tahap penting dalam proses penelitian adalah teknik pengumpulan data. Untuk data primer, cara pengumpulan data bisa termasuk melakukan observasi, sementara untuk data sekunder, pengumpulan data melibatkan menggunakan informasi dari dokumen yang telah diterbitkan. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode pengumpulan data *desk research*. Data diperoleh dengan mengakses berbagai sumber yang relevan serta mempelajari literatur analisis yang terkait dengan studi kasus yang sedang diselidiki. Selain itu, peneliti juga akan menggunakan landasan teori dan analisis yang telah ada dari dokumen-dokumen yang telah dipublikasikan sebelumnya.

1.8.6 Analisis dan Interpretasi Data

Tujuan dari analisis data adalah untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan oleh peneliti disusun secara sistematis dan sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan analisis data yang digunakan adalah analisis data *kongruen*, di mana teori yang relevan dihubungkan dengan studi kasus untuk mencapai kesimpulan yang solid (Mills et al., 2010). Dalam pendekatan *kongruen* ini, penelitian dilakukan dengan memperhatikan hubungan kausalitas antara unsur-unsur yang terdapat dalam topik penelitian.